



SEKJEN PBB SERUKAN GENCATAN SENJATA RAMADHAN DI GAZA

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara kepada pers di luar Ruang Dewan Keamanan di markas besar PBB di New York, Senin (11/3). Guterres menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Sudan selama bulan suci Ramadhan.

Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza untuk Hormati Ramadhan

PBB sebelumnya telah mengingatkan bahwa seperempat dari penduduknya berada di ambang kelaparan.

BRUSSEL (IM)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres geram dan menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, seiring dengan dimulainya bulan Ramadhan.

Ia juga menyerukan pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan penghapusan semua hambatan untuk memastikan pengiriman bantuan penyelamatan nyawa dalam kecepatan dan skala besar yang diperlukan ke Gaza.

PBB sebelumnya telah mengingatkan

bahwa seperempat dari penduduknya berada di ambang kelaparan.

"Hukum humaniter internasional sedang dilanggar. Dan ancaman serangan Israel ke Rafah dapat menjerumuskan warga Gaza ke dalam lingkaran neraka yang lebih dalam lagi," katanya kepada para wartawan, dilansir dari Reuters.

Berbicara setelah kegagalan upaya negosiasi gencatan senjata, Guterres menyerukan untuk membungkam senjata di Gaza. Dia memerintahkan bahwa kelaparan

dan kekurangan gizi mulai terjadi.

"Ini memilukan dan benar-benar tidak dapat diterima. Saya terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut di Gaza selama bulan suci ini," kata Guterres seraya menambahkan bahwa semua hambatan untuk pengiriman bantuan harus dihilangkan.

PBB mengatakan bahwa kurangnya bantuan kemanusiaan berarti kelaparan adalah risiko yang semakin meningkat di Gaza, di mana 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total militer Israel, yang berperang melawan Hamas.

Perang, yang dimulai dengan serangan berdarah Hamas pada 7 Oktober ke Israel, telah mengakibatkan kematian 31.112

warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan gencatan senjata sementara menjelang Ramadan, namun seruannya tidak digubris saat umat Islam di Gaza menandai dimulainya liburan satu bulan pada Senin (11/3).

"Mata sejarah sedang mengawasi. Kita tidak bisa berpaling. Kita harus bertindak untuk menghindari lebih banyak kematian yang dapat dicegah," kata Guterres.

"Kami telah menyaksikan bulan demi bulan pembunuhan dan penghancuran warga sipil pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya

selama saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina pada Selasa (12/3), mengatakan 2.000 staf medis yang bekerja di rumah sakit-rumah sakit di Jalur Gaza utara tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa sambil mengerjakan tugas pada hari pertama puasa Ramadan.

"Para petugas medis sangat terpapar kelaparan yang melanda Jalur Gaza utara," ujar juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf al-Qudra dalam pernyataan.

Dia menyerukan agar organisasi-organisasi bantuan internasional yang segera bergerak menyediakan makanan bagi staf medis. ● tom

Inggris Peringkat Kedua Negara Paling Tidak Bahagia di Dunia

LONDON (IM)- Inggris dinobatkan sebagai negara paling tidak bahagia kedua di dunia berdasarkan survei yang dilakukan Sapien Labs, yayasan ilmu saraf.

Menurut survei tersebut, kesehatan mental warga Inggris telah merosot sejak pandemi virus corona, dan "belum ada tanda-tanda pemulihan."

Diterbitkan pekan lalu, laporan tahunan keempat Sapien Labs yang berjudul 'Mental State of the World' menilai kesejahteraan mental 419.175 peserta yang mendukung Internet di 71 negara.

Hasilnya memberikan gambaran suram tentang negara-negara berbahasa Inggris. Dari 71 negara yang disurvei, negara-negara Anglophone seperti Inggris, Irlandia, Australia dan Selandia Baru berada di kuartil terbawah, dengan penduduk Inggris yang hanya lebih bahagia dibandingkan penduduk Uzbekistan.

Survei tersebut menempatkan Inggris delapan peringkat di belakang Yaman dan 12 peringkat di belakang Ukraina dalam hal kesehatan mental penduduknya secara keseluruhan.

Sekitar 35% warga Inggris mengatakan kepada Sapien Labs bahwa mereka tertekan atau mengalami kesulitan, angka ini turun hanya 0,7% sejak tahun lalu, ketika Inggris berada di peringkat terakhir.

Untuk menentukan kesehatan mental setiap negara secara keseluruhan, yayasan ini mengajukan 47 pertanyaan kepada individu mengenai 'suasana hati dan pandangan, diri sosial, dorongan dan motivasi, dan kemampuan beradaptasi dan ketahanan, serta kategori lainnya.

Meskipun Sapien Labs mencatat jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya subjektif, laporan lain juga sampai pada kesimpulan serupa.

Di tengah penurunan bersejarah dalam standar hidup, Kantor Statistik Nasional Inggris memunculkan pada November bahwa warga Inggris mengalami penurunan kebahagiaan dan kepuasan pribadi pada tahun yang berakhir pada Maret lalu.

Menurut laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet bulan lalu, sekitar 1,8 juta orang di Inggris saat ini sedang menunggu perawatan kesehatan mental.

Sapien Labs mencatat tingkat kesejahteraan mental di negara-negara berbahasa Inggris anjlok selama pandemi virus corona, dan penurunan ini "terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda pemulihan."

Lebih jauh lagi, laporan tersebut menemukan kesejahteraan mental lebih rendah di negara-negara di mana makanan olahan biasa dimakan, anak-anak diberikan ponsel pintar pada usia yang lebih muda, dan hubungan antar anggota keluarga lebih jauh.

Negara-negara kaya dan berbahasa Inggris mendapat skor paling tidak baik pada ketiga metrik ini.

Republik Dominika menduduki puncak daftar negara paling bahagia di dunia, disusul Sri Lanka di peringkat kedua, dan Tanzania di peringkat ketiga.

Sepuluh negara teratas adalah negara-negara Afrika, Asia, atau Amerika Latin.

"Pola ini menunjukkan bahwa kekayaan yang lebih besar dan pembangunan ekonomi tidak selalu mengarah pada kesejahteraan mental yang lebih baik," tulis Sapien Labs dalam laporannya.

● tom

Intelijen Mata-mata Rusia Tuding AS Coba Ikut Campur dalam Pilpres

MOSKOW (IM)- Badan intelijen luar negeri Presiden Vladimir Putin pada Selasa (12/3) menuduh Amerika Serikat mencoba ikut campur dalam pemilihan presiden Rusia.

Yakni dengan mengatakan bahwa Washington bahkan berencana melancarkan serangan siber terhadap sistem pemungutan suara online. Mengutip Reuters, Putin, yang hampir pasti memenangkan pemilihan presiden pada 15-17 Maret, telah mengingatkan negara-negara Barat bahwa segala upaya kekuatan asing untuk ikut campur dalam pemilu akan dianggap sebagai tindakan agresif.

Badan Intelijen Luar Negeri SVR Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memiliki informasi bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden bermaksud ikut campur dalam pemilu tersebut.

Menurut informasi yang diterima oleh Badan Intelijen Luar Negeri Federasi Rusia, pemerintahan J. Biden menetapkan tugas bagi LSM-LSM Amerika untuk mengurangi jumlah pemilih," kata SVR.

"Dengan partisipasi para pakar TI Amerika terkemuka, direncanakan untuk melakukan serangan siber terhadap sistem pemungutan suara elektronik jarak jauh, yang akan membuat penghitungan suara sebagian besar pemilih Rusia tidak mungkin dilakukan," kata SVR.

SVR, penerus utama badan mata-mata luar

negeri Direktorat Pertama KGB, tidak memberikan bukti apa pun atas pernyataannya. Belum ada reaksi langsung dari Washington.

Negara-negara Barat menganggap Putin sebagai seorang diktator, penjahat perang, dan pembunuh yang telah membawa Rusia ke dalam perampasan tanah bergaya kekaisaran yang telah melemahkan Rusia dan membentuk negara Ukraina, sekaligus menyatukan Barat dan memberikan misi pasca-Perang Dingin kepada NATO.

Putin menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran eksistensial Rusia antara peradaban suci Rusia dan Barat yang arogan, yang menurutnya sedang mengalami kemunduran budaya, politik dan ekonomi dan berusaha memermalukan Rusia setelah jatuhnya Uni Soviet.

Kremlin pada minggu lalu mengatakan bahwa Rusia tidak akan ikut campur dalam pemilihan presiden AS pada bulan November mendatang. Kremlin juga menolak temuan Amerika bahwa Moskow mengatur kampanye untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS pada tahun 2016 dan 2020.

Putin telah melontarkan serangkaian pernyataan mengenai pemilu AS, dengan mengatakan bahwa ia menganggap Joe Biden lebih disukai sebagai presiden AS berikutnya daripada Donald Trump. ● tom

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry Mundur

PORT AU PRINCE (IM)- Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengumumkan pengunduran diri. Haiti dilanda kerusuhan melibatkan geng-geng kriminal untuk mendesak mundur Henry.

Kabar pengunduran diri Henry disampaikan pemimpin Komunitas Karibia, organisasi perkumpulan negara-negara di kawasan, Senin (11/3), waktu setempat. Henry menjabat sebagai perdana menteri sejak 2021 terkait pembunuhan presiden sebelumnya, Jovenel Moise.

Para pemimpin kawasan bertemu pada Senin pagi di dekat Jamaika untuk membahas kerangka kerja transisi politik. Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu juga me-

nyerukan percepatan pembentukan dewan kepresidenan untuk menggelar pemilu guna mengatasi konflik.

Geng kriminal menyerang beberapa gedung pemerintah di Ibu Kota Port au Prince, termasuk Istana Kepresidenan.

Selain itu mereka juga menyerang kantor Kementerian Dalam Negeri dan kantor polisi. Serangan dilakukan beberapa geng kriminal dimulai sejak Jumat (8/3). "Sekitar 12 anggota geng tewas dalam aksi itu," kata seorang sumber pejabat, saat itu.

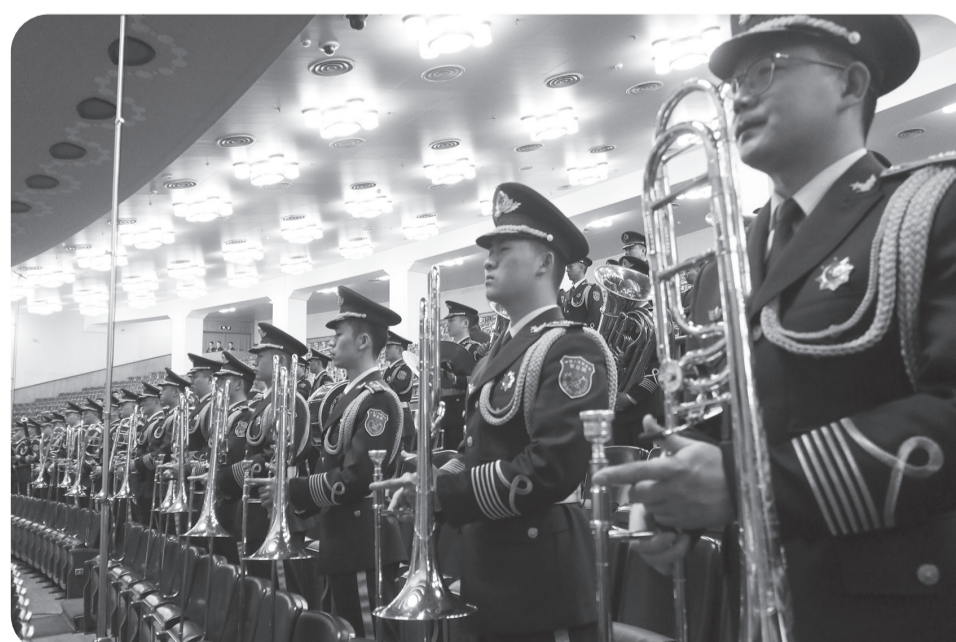
Media lokal melaporkan, warga Haiti menyaksikan baku tembak dan ledakan dalam bentrokan antara anggota geng den-

gan polisi. Akibatnya ratusan orang terpaksa meninggalkan daerah tersebut.

Sebelum itu geng bersenjata menyerbu penjara terbesar Haiti kemudian melampaui sejumlah narapidana. Mereka kemudian bersatu untuk menyerbu satu penjara lainnya.

Atas peristiwa itu, pihak berwenang Haiti mengumumkan keadaan darurat 72 jam dan jam malam untuk memburu para pelaku.

Haiti terperosok dalam krisis sosial dan politik yang parah pascapembunuhan Presiden Moise pada 7 Juli 2021. Negara Karibia itu menghadapi peningkatan aktivitas geng kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya. ● ans



KELOMPOK MUSIK MILITER PUSAT PLA TIONGKOK

Kelompok musik militer pusat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (Central Military Band of the People's Liberation Army of China) memainkan musik saat penutupan sidang parlemen "Dua Sesi" di Balai Agung Rakyat, Beijing pada Senin (11/3). Kesimpulan sidang parlemen yang berlangsung pada 4-11 Maret 2024 itu adalah menerima laporan kerja pemerintah periode 2023 dan rencana anggaran pemerintah periode 2024.

Trump Bakal Hentikan Dana ke Ukraina Jika Terpilih Jadi Presiden

MANTAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan memberikan uang untuk membantu Ukraina melawan Rusia jika dia kembali terpilih. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban setelah ia bertemu Trump di Florida pada Jumat (8/3) pekan lalu.

Bila pendanaan untuk Ukraina dihentikan, menurut Orban, hal itu akan mempercepat berakhirnya perang Rusia Ukraina.

"Dia tidak akan memberikan satu sen pun pada perang Ukraina-Rusia dan oleh karena itu perang akan berakhir," kata Orban kepada televisi pemerintah pada Minggu (10/3) malam.

"Jika Amerika tidak memberikan uang dan senjata, maka perang ini akan berakhir. Jika Amerika tidak memberikan uang, maka Eropa tidak mampu membiayai perang ini sendiri, dan perang akan berakhir," ujarnya.

Orban menolak mengirim senjata ke Ukraina. Hongaria juga tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Moskow sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 2022.

Orban terakhir kali bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Oktober di Tiongkok meskipun ada upaya Uni Eropa untuk mengisolasi Moskow.

Orban mengatakan masalah lain adalah

bagaimana perang akan diakhiri dengan perundingan perdamaian setelah gencatan senjata, dan bagaimana Eropa yang stabil dan aman akan tercipta.

"Perdamaian harus dicapai terlebih dahulu dan 'dia (Trump) memiliki sarana untuk itu,' katanya.

Para pemimpin Eropa telah lama khawatir bahwa bila Trump terpilih kembali sebagai presiden maka dukungan AS ke Ukraina akan berkurang.

Selama masa kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat terus mengucurkan dana untuk Ukraina. Dalam pidato State of the Union, SOTU, atau pidato tahunan mengenai situasi negara, Presiden AS Joe Biden mendesak pengesahan rancangan undang-undang bantuan luar negeri Senat senilai US\$ 95 miliar yang akan mengirimkan bantuan ke Ukraina, negara-negara Indo-Pasifik, dan Israel serta bantuan kemanusiaan ke Gaza. RUU tersebut mendapat tenggang dari DPR yang dikuasai Partai Republik.

Bantuan AS ke Ukraina menjadi agenda penting dalam pidato SOTU tahunan presiden (State of The Union) tahun ini. "Ukraina dapat menghentikan Putin jika kita mendukung Ukraina dan menyediakan senjata yang dibutuhkannya untuk mempertahankan diri," ujar Biden dilansir dari VOA pada Senin (11/3). ● tom